



Model Manajemen Perencanaan Terpadu Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi Regional

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Laode Herman Program Studi Manajemen Rekayasa Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo LaodeHerman@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Try Sugiyarto Soeparyanto Program Studi Manajemen Rekayasa Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo TrySugiyartoSoeparyanto@gmail.com	
La Ode Muhamad Nurrahmad Arsyad Program Studi Manajemen Rekayasa Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo arsyadjr@uho.ac.id	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Herman, L., Soeparyanto, T. S., & Arsyad, L. O. M. N. (2025). Model Manajemen Perencanaan Terpadu Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi Regional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5494-5503.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji model manajemen perencanaan terpadu pada Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau sebagai strategi untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai desain penelitian, dengan pelaksanaan penelitian dilakukan di Kota Baubau dengan Pelabuhan Penyeberangan Baubau sebagai objek kajian utama dari Bulan November – Desember 2025. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Manajemen perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Kota Baubau masih menghadapi kendala utama berupa pendekatan sektoral dan lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada efektivitas pengelolaan pelabuhan. Meskipun demikian, pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas regional, memperluas aktivitas ekonomi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Kata Kunci: Ekonomi Regional, Manajemen, Pelabuhan, Pelabuhan, Pemerataan Pembangunan

Abstract

This study examines the integrated planning management model at the Ferry Port in Baubau City as a strategy to support equitable development and regional economic growth. This study used a qualitative approach as its research design, with the research conducted in Baubau City, with the Baubau Ferry Port as the primary object of study from November to December 2025. The study concluded that the planning management of the Baubau City Ferry Port still faces major obstacles in the form of a sectoral approach and weak cross-sectoral policy integration, which impacts the effectiveness of port management. Nevertheless, ports play a strategic role in driving economic growth, strengthening regional connectivity, expanding local economic activity, and accelerating equitable development in the archipelago.

Key Words: Regional Economy, Management, Ports, Ferry Ports, Equitable Development

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hado et al., 2024a; Hasina & Satyadharma, 2023; Usman, 2020). Syukriyanto (2021) menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.

Pembangunan yang dilakukan secara berencana dipandang sebagai usaha rasional dan sistematis dalam mendorong transformasi masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih maju (Suaib, 2023; Subandi, 2011). Sejalan dengan itu, Siagian (2012) menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya sadar suatu bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan terencana menuju masyarakat modern. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, Todaro (2009) mengemukakan bahwa tujuan inti pembangunan mencakup peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomi serta sosial masyarakat. Ketiga tujuan tersebut tidak dapat dicapai tanpa tersedianya infrastruktur yang memadai sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi dan sosial.

Prasetyo & Firdaus (2009) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan sosial dan ekonomi daerah (Annisa et al., 2025; Hado et al., 2024b; Oktaviani et al., 2024). Ketersediaan infrastruktur yang memadai mempercepat mobilitas barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar (Imsar & Zaman, 2024).. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut memperkuat struktur ekonomi lokal, mendorong investasi, dan menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif bagi masyarakat.

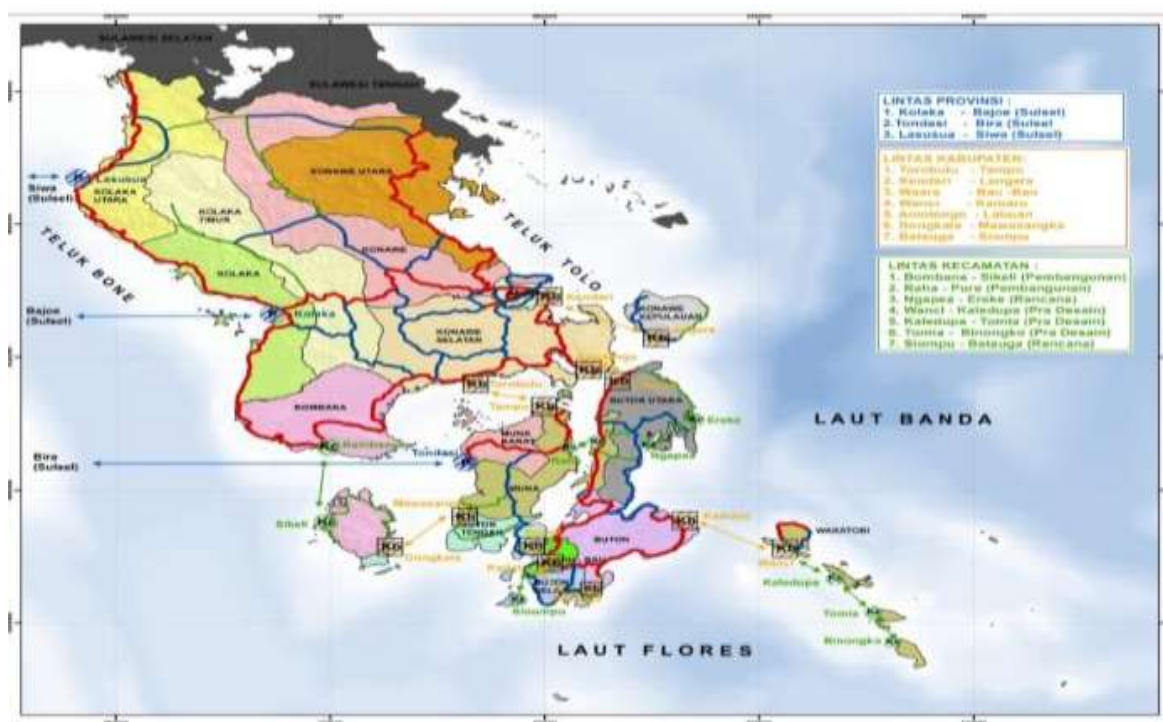
Salah satu komponen infrastruktur yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan adalah infrastruktur transportasi (Rajulan et al., 2025; Sulistyono & Satyadharma, 2025).. Transportasi berfungsi sebagai penghubung utama antara kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya suatu wilayah (Adisasmita, 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan keterjangkauan sistem transportasi secara langsung memengaruhi kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta intensitas interaksi sosial masyarakat. Infrastruktur transportasi yang andal mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi waktu serta biaya produksi (Simorangkir, 2022).. Dengan demikian, transportasi menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut dan pelabuhan penyeberangan memiliki peran yang sangat strategis (Muammar & Mosyofa, 2024; Rahim et al., 2024). Pelabuhan menjadi simpul utama pergerakan orang dan barang, sekaligus penggerak

utama pertumbuhan ekonomi wilayah (Efimova & Gapochka, 2020; Fisur et al., 2020; Ma et al., 2021).

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan karakteristik wilayah kepulauan sangat bergantung pada keberadaan pelabuhan penyeberangan untuk menjamin konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah (Almaliki et al., 2024; Syukriyanto, 2021).



Gambar 1 Peta Jaringan Pelabuhan Penyeberangan Se-Sultra
Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sultra (2024)

Pelabuhan, khususnya pelabuhan penyeberangan, tidak hanya berperan sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai simpul distribusi ekonomi, pusat pertumbuhan wilayah, serta instrumen pemerataan pembangunan antarwilayah (Asriyati et al., 2023; Satyadharma, 2024). Dalam wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, peran pelabuhan penyeberangan menjadi semakin strategis karena menjadi penghubung utama antara pusat-pusat aktivitas ekonomi dan daerah hinterland (Razak & Mokodompit, 2024).

Kota Baubau memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai pintu gerbang utama Kepulauan Buton dan wilayah sekitarnya (Malim et al., 2019).. Pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau melayani pergerakan penumpang dan barang antarwilayah kepulauan, termasuk konektivitas dengan Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, Muna, dan wilayah lain di Sulawesi Tenggara.

Data menunjukkan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Baubau-Waara merupakan pelabuhan penyeberangan terpadat di Sulawesi Tenggara dengan kontribusi 37% dari total pergerakan penumpang tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan peran strategis pelabuhan dalam mobilisasi masyarakat antar-pulau, yang tidak hanya memperkuat fungsi transportasi, tetapi juga menjadi indikator kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat di Kota Baubau. Sebagai simpul utama dalam sistem penyeberangan regional, tingginya volume penumpang ini menunjukkan bahwa pelabuhan Baubau-Waara memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang penting bagi hinterlandnya, serta mencerminkan tingginya mobilitas penduduk yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, pendidikan, maupun layanan publik.

Kondisi ini memperlihatkan betapa strategisnya peran Pelabuhan Penyeberangan Baubau dalam sistem transportasi regional. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa manajemen perencanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pelayanan, belum optimalnya integrasi dengan perencanaan pembangunan wilayah, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Satyadharma et al., 2024).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Baubau tengah mendorong pengembangan Pelabuhan Murhum sebagai pelabuhan laut utama yang akan menjadi pintu gerbang ekonomi dan

pariwisata Sulawesi Tenggara. Pengembangan Pelabuhan Murhum Baubau tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan juga sudah memiliki Rencana Induk Pelabuhan Murhum Baubau (RIP Baubau) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 696 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pelabuhan Murhum Baubau. Dalam konsep pembangunan Pemerintah Kota Baubau, pelabuhan ini dibangun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan demi mendukung program jangka panjang menjadikan Kota Baubau Pintu Gerbang Ekonomi dan Pariwisata di Sulawesi Tenggara.

Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau yang lebih terintegrasi, sistematis, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi regional jika rencana dari Pemkot Baubau terealisasi sehingga dampak dan manfaat dari Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau akan dirasakan tidak hanya di Kota Baubau namun juga di daerah sekitarnya.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai desain penelitian, yaitu metode yang berfokus pada penggambaran dan pemaknaan terhadap fenomena, data, serta pengalaman yang diperoleh peneliti di lapangan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kota Baubau dengan Pelabuhan Penyeberangan Baubau sebagai objek kajian utama. Kegiatan penelitian berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak November-Desember 2025. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. Rincian informan dalam penelitian ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih mendalam.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Dr. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
2	Sulfiana Fitra Nang, S.Hut.,MM	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Boni Herya, S.Kom	Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baubau – Waara Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : Data Primer (2025)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Eksisting Manajemen Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau
Kondisi perencanaan yang masih bersifat sektoral sebagaimana tergambar dalam pengembangan pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur strategis (Faradilah et al., 2021). Pola kerja yang terfragmentasi menyebabkan setiap perangkat daerah lebih menekankan pada pencapaian target sektoral dibandingkan kepentingan pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Akibatnya, **pelabuhan sebagai simpul transportasi belum optimal diposisikan sebagai bagian dari sistem pembangunan wilayah yang terintegrasi**, melainkan sekadar proyek fisik yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan kuat dengan kebijakan tata ruang, pengembangan ekonomi daerah, dan konektivitas regional.

Ketiadaan mekanisme integrasi yang sistematis antara rencana pengembangan pelabuhan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta RTRW memperbesar risiko terjadinya ketidaksinkronan arah pembangunan (Keban, 2019). Hal ini berdampak pada munculnya inefisiensi pemanfaatan ruang, duplikasi program, keterbatasan dukungan infrastruktur pendukung, serta rendahnya daya ungkit pelabuhan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam jangka panjang, pendekatan sektoral juga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena tidak memperhitungkan keterkaitan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan secara holistik.

2. Dampak Pelabuhan Penyeberangan Baubau bagi Pertumbuhan Kota Baubau dan wilayah sekitarnya

Pelabuhan Penyeberangan Baubau memiliki peran strategis sebagai simpul konektivitas utama yang menghubungkan Kota Baubau dengan wilayah kepulauan di sekitarnya, seperti Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna (Almaliki et al., 2024).

Keberadaan pelabuhan ini memperlancar mobilitas orang, barang, dan jasa, sehingga mendorong integrasi ekonomi antarwilayah dan memperkuat posisi Baubau sebagai pusat pertumbuhan regional di kawasan Kepulauan Buton (Almaliki et al., 2024; Saputra et al., 2023).



Gambar 2 Situasi di Pelabuhan Penyeberangan Baubau
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Peningkatan konektivitas tersebut berdampak langsung pada efisiensi distribusi logistik, penurunan biaya transportasi, serta stabilitas pasokan kebutuhan pokok di wilayah *hinterland* (Firdausy, 2021). Dalam jangka panjang, konektivitas yang optimal juga mempercepat integrasi ekonomi antarwilayah dan memperluas peluang investasi yang berkelanjutan (Harsono, 2024; Jabeen & Fernandez, 2022; Tariq, 2024).

Dari sisi ekonomi perkotaan, aktivitas Pelabuhan Penyeberangan Baubau memicu pertumbuhan sektor perdagangan, jasa transportasi, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Satyadharma et al., 2024).

Munculnya aktivitas ekonomi turunan di sekitar kawasan pelabuhan, seperti jasa bongkar muat, angkutan darat, penginapan, dan kuliner, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal (Ayhan, 2023; Deswanto et al., 2024; Fisur et al., 2020; Gunawan et al., 2021). Keberadaan sektor-sektor tersebut menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan, tidak hanya bagi pelaku usaha utama, tetapi juga bagi UMKM dan sektor informal. Dinamika ini memperkuat struktur ekonomi lokal, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat struktur ekonomi Kota Baubau dan meningkatkan daya saing wilayah sebagai kota jasa dan perdagangan. Penguatan tersebut tercermin dari meningkatnya peran sektor tersier, khususnya transportasi, logistik, dan pariwisata, sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Daya saing wilayah juga ditopang oleh kemudahan akses pasar, efisiensi rantai pasok, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha lokal (Arsal, 2025). Secara simultan, hal ini mempercepat transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain dampak ekonomi, pelabuhan penyeberangan juga berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan wilayah (Dewi et al., 2023; Satyadharma et al., 2024). Keberadaan pelabuhan membuka akses wilayah terpencil terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta jaringan distribusi nasional (Raimbault, 2019). Hal ini mengurangi kesenjangan antarwilayah, mempercepat arus mobilitas penduduk dan barang, serta memperluas peluang sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau sekitarnya.

Pemerataan akses tersebut mendorong inklusivitas pembangunan dan memperkuat kohesi sosial sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan (Popova, 2020).

Aksesibilitas yang semakin baik memungkinkan masyarakat di daerah kepulauan untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan di Kota Baubau dengan lebih mudah. Hal ini berimplikasi pada pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Saksono & Utami, 2024).

Pelabuhan Penyeberangan Baubau juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing Kota Baubau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi Tenggara bagian kepulauan. Dengan semakin terhubungnya wilayah-wilayah seperti Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi, Kota Baubau berperan sebagai hub distribusi dan layanan ekonomi regional. Kondisi ini memperkuat posisi strategis Baubau dalam sistem transportasi nasional dan mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun demikian, besarnya peran Pelabuhan Penyeberangan Baubau belum sepenuhnya diimbangi dengan manajemen perencanaan yang terintegrasi. Tanpa dukungan perencanaan terpadu dan pengelolaan yang berkelanjutan, potensi pelabuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan kota dan ekonomi regional berisiko tidak optimal dalam jangka waktu yang panjang (Kong & Liu, 2021).

Oleh karena itu, penguatan model manajemen perencanaan terpadu menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak positif pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan Kota Baubau dan kawasan sekitarnya secara inklusif dan berkelanjutan.

3. Model Manajemen Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau

Model manajemen perencanaan pelabuhan penyeberangan di Kota Baubau harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan wilayah kepulauan dan maritim yang menjadi karakter utama daerah ini (Saksono, 2024). Kota Baubau memiliki posisi strategis sebagai simpul transportasi laut di kawasan Kepulauan Buton dan jalur penghubung antara Sulawesi Tenggara, Maluku, dan wilayah Indonesia Timur lainnya (Renyaaan, 2023; Yusuf & Idrus, 2024)

Oleh karena itu, pelabuhan penyeberangan di Baubau tidak dapat direncanakan secara parsial, melainkan harus menjadi instrumen utama dalam memperkuat konektivitas regional, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan antarwilayah kepulauan.

Dalam hal ini, model manajemen perencanaan harus menempatkan pelabuhan sebagai pusat penggerak sistem ekonomi lokal dan regional (Rohmah, 2024). Perencanaan pengembangan pelabuhan perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD Kota Baubau, RPJMD, RTRW, serta rencana induk pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan. Sinkronisasi kebijakan ini penting agar pembangunan pelabuhan mendukung pengembangan kawasan perdagangan, pusat logistik, pariwisata bahari, dan konektivitas antar-pulau yang menjadi basis ekonomi Kota Baubau. Ketidaksinkronan perencanaan berpotensi menurunkan efektivitas fungsi pelabuhan dan menghambat optimalisasi potensi wilayah pesisir (Asfar, 2025; Dalisawintri et al., 2025).

Model manajemen perencanaan yang diusulkan juga menuntut penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta instansi vertikal terkait (Marín-González et al., 2022; Said, 2024; Vroblevska et al., 2022). Di Kota Baubau, lemahnya integrasi antarperangkat daerah sering menyebabkan keterlambatan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, seperti akses jalan, fasilitas logistik, dan kawasan penunjang ekonomi (Rosyid et al., 2021). Oleh karena itu, pembentukan forum koordinasi perencanaan pelabuhan yang bersifat permanen dan memiliki kewenangan operasional menjadi kebutuhan mendesak (Andersen et al., 2023).

Selain aspek kelembagaan, model perencanaan harus mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pelaku usaha pelayaran, operator pelabuhan, asosiasi UMKM pesisir, komunitas nelayan, serta masyarakat sekitar kawasan pelabuhan. Di Baubau, keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan karena sebagian besar aktivitas ekonomi pesisir bergantung pada kelancaran transportasi laut (Permata et al., 2024). Partisipasi multipihak memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi setempat dan memperkuat legitimasi kebijakan publik (Deni, 2023; Nelly, 2024).

Selanjutnya, model manajemen perencanaan pelabuhan di Kota Baubau perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang mengukur tidak hanya capaian fisik pembangunan, tetapi juga dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan (Satyadharma et al., 2024). Indikator keberhasilan harus mencakup peningkatan volume penumpang dan barang,

penurunan biaya logistik antar-pulau, pertumbuhan UMKM pesisir, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan (Rahim et al., 2024).

Dengan pendekatan tersebut, pelabuhan penyeberangan tidak hanya menjadi infrastruktur transportasi, tetapi menjadi lokomotif pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi bagi Kota Baubau. Pelabuhan berfungsi sebagai pusat integrasi aktivitas ekonomi, distribusi logistik, pariwisata, dan mobilitas sosial yang mempercepat pertumbuhan kawasan pesisir dan kepulauan sekitarnya (Aeywaldy et al., 2024; Jinca & Humang, 2023). Dampak lanjutannya terlihat pada meningkatnya investasi, berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru, serta terbangunnya ekosistem usaha yang mendorong transformasi ekonomi Kota Baubau secara inklusif dan berkesinambungan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa manajemen perencanaan Pelabuhan Penyeberangan di Kota Baubau masih menghadapi tantangan serius akibat pendekatan sektoral dan lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelabuhan sebagai instrumen pembangunan wilayah. Namun demikian, pelabuhan terbukti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas regional, memperluas aktivitas ekonomi lokal, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan kepulauan.

Oleh karena itu, diperlukan model manajemen perencanaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis kinerja dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan model tersebut akan menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Baubau tidak hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi sebagai lokomotif pembangunan wilayah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif bagi Kota Baubau dan wilayah sekitarnya.

E. Referensi

- Adisasmata, S. A. (2011). *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Graha Ilmu.
- Aeywaldy, B. B., Januarti, T., Anugrah, R., Putri, S. M., Anis, A., & Saputra, P. P. (2024). Analisis Pelabuhan Sebagai Sumber Penghidupan Masyarakat Sungai Selan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(8), 3160–3171. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i8.2024.3160-3171>
- Almaliki, M. F., Ode, L., Nurrahmad, M., & Putra, A. A. (2024). Analisis Kinerja Layanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau dengan Pendekatan Importance-Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(4), 2147–2158. <https://doi.org/10.54082/jupin.809>
- Andersen, T., Aryee, J., Acheampong, G., & Hansen, A. S. (2023). The continuous search for new port governance models: experiences from a developing country. *Journal of Shipping and Trade*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s41072-023-00139-8>
- Annisa, Dirhamsyah, D., Soeparyanto, T. S., & Kadir, I. (2025). Kajian Dampak Pengembangan Infrastruktur Melalui Penataan Kawasan Kumuh (Studi Kasus : Segmen IV Puday-Lapulu). *MEDIA KONSTRUKSI*, 10(1), 73–82. <https://doi.org/10.33772/jmk.v10i1.74>
- Arsal, R. A. (2025). *Daya Saing untuk Pemenuhan Pangan dan Kesejahteraan Petani*. KBM Indonesia.
- Asfar, A. (2025). *Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir*. Deepublish.
- Asriyati, A., Hado, H., Sufrianto, S., & Satyadharma, M. (2023). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap jasa pelayanan Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Sultra Civil Engineering Journal*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.54297/sciej.v4i2.509>
- Ayhan, E. E. (2023). From Ports to Prosperity: Leveraging Maritime Sector for Poverty Reduction. *Journal of Marine and Engineering Technology*, 3(2), 99–109. <https://doi.org/10.58771/joinmet.1402658>
- Dalisawintri, Noor, H. M., & Irawan, B. (2025). *Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Nas Media Pustaka.
- Deni, A. (2023). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Dan Analisis)*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Deswanto, C., Fuad Aziz, M., & Budiharto, T. (2024). Pengaruh Pelabuhan Rakyat Banggai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. *Journal of Urban Planning Studies*, 5(1), 011–018. <https://doi.org/10.35965/jups.v5i1.191>

- Dewi, R., Pitri, P., Siregar, I., & Purnomo, B. (2023). Kontribusi Pelabuhan Talang Duku Terhadap Sektor Perekonomian Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Indonesian History*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/jih.v11i1.67506>
- Efimova, E. G., & Gapochka, A. A. (2020). Seaports as drivers of regional economic development: The case of Saint Petersburg and Leningrad Province. *Case Studies on Transport Policy*, 8(2), 383–393. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2019.10.003>
- Faradilah, C., Aulia, N. S., Jariah, A., & Akbar, A. (2021). Refleksi Transportasi Wilayah Perkotaan terhadap Perkembangan Transportasi Laut di Kota Baubau. *SENSISTEK: Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 51–55.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., Neneng, & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54. https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v5i2.603
- Gunawan, R., Lubis, Z., Kusnasari, S., & Kustini, R. (2021). Peran Pelabuhan dalam Mendorong Arus Barang dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. *DEVICE: Journal Of Information System, Computer Science and Information Technology*, 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.46576/device.v2i1.1382>
- Hado, H., Ilham, V. A., Aldinoman, A., & Satyadharna, M. (2024a). Model Pengembangan Pelabuhan Nambo Untuk Optimalisasi Distribusi Aspal Buton Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Kabupaten Buton. *MEDIA KONSTRUKSI*, 9(4), 347–356. <https://doi.org/10.33772/medkons.v9i4.78>
- Hado, Ilham, V. A., Aldinoman, & Satyadharna, M. (2024b). Mekanisme Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo Kabupaten Buton (Tinjauan Deskriptif). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1401–1409. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.683>
- Harsono, I. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah: Teori, Kebijakan, dan Aplikasinya dalam Pembangunan Desa*. Mega Press Nusantara.
- Hasina, H., & Satyadharna, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- Imsar, I., & Zaman, M. Q. (2024). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 14(2), 42. <https://doi.org/10.35448/jequ.v14i2.30143>
- Jabeen, S., & Fernandez, S. (2022). Regional Connectivity and Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Regional Connectivity and Development*, 1(1), 33–43. <https://journalofregionalconnectivityanddevelopment.com/index.php/2/article/view/6>
- Jinca, M. Y., & Humang, W. P. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Wilayah Kepulauan*. Nas Media Pustaka.
- Keban, Y. T. (2019). The Complexities of Regional Development Planning Reform: The Indonesian Case. *Policy & Governance Review*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.124>
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 696 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Murhum Baubau.
- Kong, Y., & Liu, J. (2021). Sustainable port cities with coupling coordination and environmental efficiency. *Ocean & Coastal Management*, 205, 105534. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105534>
- Ma, Q., Jia, P., She, X., Haralambides, H., & Kuang, H. (2021). Port integration and regional economic development: Lessons from China. *Transport Policy*, 110, 430–439. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.06.019>
- Malim, D. D. L. O., Sumantri, I., Supriadi, S., & Tahara, T. (2019). Inventarisasi dan Pengembangan Potensi Cagar Budaya Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.46891/kainawa.1.2019.1-15>
- Marín-González, F., Moganadas, S. R., Paredes-Chacín, A. J., Yeo, S. F., & Subramaniam, S. (2022). Sustainable Local Development: Consolidated Framework for Cross-Sectoral Cooperation via a Systematic Approach. *Sustainability*, 14(11), 6601. <https://doi.org/10.3390/su14116601>
- Muammar, N., & Mosyofa, A. (2024). Kebijakan Maritim Indonesia dalam Menunjang Sistem

- Keamanan Transportasi Laut. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 46–50. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v7i1.31639>
- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i1.119>
- Oktaviani, V. R., Lestari, A., Prayudha, G. A., & Malik, A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9882–9892. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1823>
- Permata, D. A., Devi, S. L., Nisa, S., & Pramasha, R. R. (2024). Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Dampaknya terhadap Perekonomian Lokal. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(2), 380–390. <https://doi.org/10.61214/ijen.v2i2.503>
- Popova, O. H. (2020). Inclusive Development: A New Concept or an Update of the Sustainable Development Concept? *Economy and Forecasting*, 1, 112–123. <https://ideas.repec.org/a/eip/journal/y2020i1p128-141.html>
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–231. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53638>
- Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A. (2024). *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Raimbault, N. (2019). From regional planning to port regionalization and urban logistics. The inland port and the governance of logistics development in the Paris region. *Journal of Transport Geography*, 78, 205–213. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.06.005>
- Rajulan, M., Sulisty, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Semangat Pahlawan sebagai Teladan dalam Membangun Transportasi Berkeadilan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 03(04), 1326–1334. <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1536>
- Razak, A., & Mokodompit, E. A. (2024). Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 377–382. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.382>
- Renyaan, K. (2023). *Ragam Sejarah tentang Buton dan Maluku*. Deepublish.
- Rohmah, N. (2024). *Manajemen Kepelabuhanan: Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pelabuhan di Indonesia*. Samudra Biru.
- Rosyid, A., Setiawan, M. I., Nasihien, R. D., Razi, M. A. M., Isradi, M., Muchayan, A., & Sukoco, A. (2021). Integrasi Transportasi Publik Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. In *E-Mobility| Sustainable Mobility Transportasi Publik dan Teknologi GIS Mendukung Peningkatan Pembangunan Daerah* (pp. 8–25). IPEST.
- Said, A. (2024). *Kolaborasi Perencanaan Pembangunan*. Deepublish.
- Saksono, H. (2024). Model Tata Kelola Metropolitan Kepulauan: Studi Kasus Kota Baubau Menuju Transformasi Berkelanjutan. *Kainawa: Jurnal Pembangunan Dan Budaya*, 6(2), 101–111.
- Saksono, H., & Utami, K. J. (2024). Dinamika Pembangunan Manusia Inklusif dan Berkelanjutan di Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Kota Baubau, 2005-2023. *Kainawa: Jurnal Pembangunan Dan Budaya*, 6(1), 7–15.
- Saputra, Y. J., Ahmad, S., & Satyadharma, M. (2023). Pengaruh Kualitas Jasa Layanan Terminal Pelabuhan Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Feri di Pelabuhan Penyeberangan Baubau. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 204–217. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.1082>
- Satyadharma, M. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penumpang Terhadap Kualitas Layanan di Pelabuhan Feri Kendari-Wawonii. *BANDAR: Journal of Civil Engineering*, 6(1), 9–15. <https://doi.org/10.31605/bjce.v6i1.3369>
- Satyadharma, M., Rachman, R. M., Sabar, A. D., Saputra, Y. J., & Hado, H. (2024). Pelabuhan Hijau dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Studi Deskriptif Di Pelabuhan Penyeberangan Baubau). *Jurnal Teknik*, 18(1), 32–39. <https://doi.org/10.31849/teknik.v18i1.19681>
- Siagian, S. (2012). *Fungsi-fungsi manajemen*. Bumi Aksara.
- Simorangkir, W. (2022). Analisa Dan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Serta Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Price: Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(01), 29–35. <https://doi.org/10.58471/jecoa.v1i01.3595>
- Suaib, M. S. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.
- Sulistyo, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Ekonomi Berbagi dan Disrupsi Pasar Transportasi di

- Indonesia: Kajian Literatur atas Peran Transportasi Online dalam Transformasi Ekonomi. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(1), 29–40. <https://scriptaintelektual.com/ascendia/article/view/75>
- Syukriyanto. (2021). *Pengelolaan Simpul Transportasi Laut di Kabupaten Wakatobi*. Universitas Halu Oleo.
- Tariq, U. (2024). Enhancing Regional Connectivity: Strategies for Sustainable Development. *Kashf Journal of Multidisciplinary Research*, 1(04), 1–9. <https://doi.org/10.71146/kjmr83>
- Todaro, M. (2009). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Usman, A. (2020). The Role of Indonesian Constitutional Court in Strengthening Welfare State and the Rule of Law. *Lex Publica*, 7(1), 11–27. <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/103>
- Vroblevska, E., Gobina, I., Springe, L., Bukova-Zideluna, A., Linina, I., & Villerusa, A. (2022). Developing the model for cross-sectoral cooperation for promoting health and wellbeing. *SHS Web of Conferences*, 131, 02001. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202213102001>
- Yusuf, M., & Idrus, S. H. (2024). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Benteng Keraton Buton dalam Meningkatkan Wisatawan Asing di Kota Baubau. *REZ PUBLICA*, 10(1), 45–68. <https://rezpublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/37>